

PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN STRUKTUR DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH SKPD DENGAN PENGAWASAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI KAB. KUANTAN SINGINGI

Oleh:

Ernawilis

Pembimbing : Azwir Nasir dan Pipin Kurnia

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: ernawilis1814@yahoo.co.id

The Effect Accountability Publik, Participation in Budget Preparation, The Clarity of Budget Goal, and Decentralized Structure on The Performance On Local Government SKPD Whit Internal Control as Variable Pemoderasi Kuantan Singingi regency

ABSTRACT

The purpose of this research is to test effect of accountability publik, participation in budget preparation, the clarity of budget goal, and decentralized structure effect positive partially on local government performance, and to test internal control will moderating effect accountability public, participation in budget preparation, the clarity of budget goal, and decentralized structure effect positive partially on local government performance. This research is survey method. The population in this study is SKPD in the government of Kuantan Singingi regency. The selection the sample with purposive sampling method with total 84 respondents. The data used in this study is primary data. Data was collected by distributed questionnaires. The teknik of analysis are using multiple linear regression using SPSS 21 sotware. The findings in this study are: accountability publik, participation in budget preparation, the clarity of budget goal, and decentralized structure effect positive partially on local government performance. While the internal control can moderating accountability publik, and participation in budget preparation effect partially on local government performance, and internal control can't moderating the clarity of budget goal, and structure decentralized effect partially on local government performance.

Keywords : Accountability, Budget, Decentralized, Control, and Performance.

PENDAHULUAN

Pada umumnya ada tiga permasalahan yang biasa dihadapi pemerintah daerah yaitu ke tidak efektifan, inefisiensi dan *private inurement* (penggunaan dana untuk

kepentingan individu). Hal ini disebabkan karena tidak terdapat mekanisme dasar pertanggung jawaban yang baku seperti organisasi bisnis. Organisasi pemerintahan tidak mengenal kepemilikan (*self interest*) yang dapat memaksakan pencapaian

tujuan. Pemerintah daerah juga tidak mementingkan faktor persaingan yang sering kali digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efesiensi, disamping itu, pemerintah daerah tidak memiliki barometer keberhasilan seperti pada organisasi bisnis sehingga sulit untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pemerintah daerah.

Ada beberapa faktor yang diduga penyebab kinerja pemerintah daerah rendah diantaranya karena sistem pengelolaan keuangan daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggungjawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengawasan. Dalam proses penganggaran, pemerintah daerah selalu mengalami keterlambatan di dalam pengesahan perda APBD. Keterlambatan ini menyebabkan banyak program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan untuk tahun anggaran berjalan sehingga terjadi keterlambatan pembangunan daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang harus disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD itu sendiri merupakan suatu proses yang panjang melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan penjaringan aspirasi masyarakat yang kemudian dibahas melalui Rapat koordinasi Pembangunan (Rakorbang) pada tiap tingkatan.

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas setiap

aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas publik adalah pemberian informasi kepada publik dan konstitusi lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Anggaran adalah alat perencanaan dan pengendalian yang sangat penting, sehingga proses penyusunan anggaran merupakan aspek penting dalam pencapaian keberhasilan dari suatu organisasi. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan, pegawai dan manajer dalam penyusunan anggaran yang dinamakan dengan partisipasi anggaran.

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Desentralisasi akan menunjukkan tingkat otonomi yang didelegasikan pada SKPD sehingga SKPD mempunyai tanggungjawab yang lebih besar terhadap perencanaan dan pengendalian aktivitas operasi serta membutuhkan informasi yang lebih banyak. Jadi organisasi yang lebih terdesentralisasi seperti pelaksanaan otonomi di Indonesia, maka SKPD mempunyai otonomi yang lebih besar dalam proses pengambilan atau

penetapan keputusan. Desentralisasi dapat mendorong terjaringnya aspirasi masyarakat dengan adanya umpan balik antara SKPD dengan masyarakat. Tiap-tiap satuan kerja wajib mempertanggung jawabkan anggaran yang telah dipakai dengan menyusun laporan keuangan SKPD.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemerintah, Gubernur dan Bupati/walikota adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemerintah desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan bidang wewenangnya masing-masing. Disamping pengawasan tersebut pengawasan oleh masyarakat (sosial kontrol) diperlukan dalam mewujudkan peran serta masyarakat guna menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan ekonomis yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1)Apakah akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi?, 2)Apakah pengawasan internal akan memoderasi pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran

dan struktur desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi?

Tujuan penelitian adalah Untuk memperoleh bukti mengenai 1)pengaruh akuntabilitas publik, pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. 2)Untuk memperoleh bukti pengawasan internal akan memoderasi pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan struktur desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

KAJIAN PUSTAKA DAN PEMBANGUNAN HIPOTESIS

Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi organisasi yang tentang dalam *strategic planning* suatu organisasi (Mahsun, 2006). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja biasa diketahui jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tanpa tujuan atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukur. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perencanaan strategi (*strategic planning*) suatu organisasi.

Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi, Turner & Hulme (1997) dalam Mardiasmo (2002:58).

Partisipasi Penyusunan Anggaran

Menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA) yang saat ini telah menjadi *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), definisi anggaran dalam Bastian (2006: 164), adalah sebagai rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Menurut Ikhsan & Ishak (2005:173), Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh kedua belah pihak atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pembuat dan penerima keputusan dan mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran daerah serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran tersebut.

Kejelasan sasaran Anggaran

Kenis (1979) dalam Putra (2013) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Struktur Desentralisasi

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan umum yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi dapat diwujudkan dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengawasan Internal

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan

atas penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi:

- a. Administrasi umum pemerintahan
- b. Urusan pemerintah

Penjagaan administrasi umum pemerintah dilakukan terhadap:

- a. Kebijakan daerah
- b. Kelembagaan
- c. Pegawai daerah
- d. Keuangan daerah
- e. Barang daerah

Pengawasan urusan pemerintah dilakukan terhadap:

- a. Urusan wajib
- b. Urusan pilihan
- c. Dana dekosentrasi
- d. Tugas pembantuan
- e. Kebijakan pinjaman hibah luar negeri.

Perumusan Hipotesis

Dengan mengacu pada latar belakang, perumusan masalah, tinjauan teoritis, serta beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Model 1:

H1: *Akuntabilitas Publik Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*

H2: *Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.*

H3: *Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*

H4: *Struktur Desentralisasi Berpengaruh Signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah*

Model 2:

H5: *Pengawasan Internal Berpengaruh Signifikan Positif Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.*

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun jumlah keseluruhan populasi adalah 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan sampel yang diambil dari tiap-tiap unit satuan kerja perangkat daerah adalah sebanyak dua orang yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran di setiap SKPD yang berposisi sebagai Kepala Satuan Kerja dan Kepala Bidang Program di setiap SKPD di Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga total keseluruhan sampel yang diambil adalah sebanyak 84 orang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data tersebut berasal dari jawaban responden atas kuesioner yang dibagikan kepada kepala satuan kerja dan kepala bidang program di setiap SKPD tersebut.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebar kuesioner. Kuesioner penelitian diadopsi dari kuesioner yang telah digunakan peneliti-peneliti terdahulu.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan *skala likert*. *skala likert* adalah metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju dan tidak kesetujuannya terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu.

Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y).

Variabel Bebas (Independent Variabel)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Akuntabilitas Publik (x_1), Partisipasi Penyusunan Anggaran (x_2), kejelasan Sasaran Anggaran (x_3), Struktur Desentralisasi (x_4).

Variabel Moderasi

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderasi adalah pengawasan internal (x_5).

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner. Kinerja dapat dilihat dari :

1. Penentuan tujuan, sasaran, kebijakan, dan tindakan
2. Mengumpulkan dan menyiapkan informasi
3. Pertukaran informasi
4. Mengevaluasi dan menilai proposal, laporan, dan kinerja
5. Mengarahkan, memimpin, dan mengembangkan anak buah
6. Mempertahankan, menyeleksi, menempatkan, dan mempromosikan anak buah
7. Pembelian, penjualan, kontrak untuk barang dan jasa

8. Cara pencapaian informasi tentang visi dan misi.

Akuntabilitas publik dapat dilihat dari:

1. akuntabilitas jujur,
2. akuntabilitas hukum,
3. akuntabilitas program,
4. akuntabilitas proses, dan
5. akuntabilitas kebijakan

Partisipasi penyusunan anggaran dapat dilihat dari:

1. Program
2. Bawahan
3. Informasi
4. Kontribusi

Kejelasan sasaran anggaran dapat dilihat dari:

1. tujuan
2. kinerja
3. standar
4. jangka waktu
5. sasaran prioritas
6. tingkat kesulitan
7. koordinasi

Struktur desentralisasi dapat dilihat dari:

1. Pemberian wewenang untuk jumlah anggaran
2. Pemberian wewenang untuk menentukan program dan kegiatan
3. Pemberian wewenang dalam menentukan penambahan dan mutasi pegawai
4. Pemberian wewenang untuk menentukan penambahan dan mutasi pegawai

Pengawasan internal dapat dilihat dari:

1. Monitoring penyusunan anggaran
2. Monitoring pelaksanaan anggaran
3. Monitoring barang milik daerah
4. Review atas laporan keuangan

Metode Analisis Data

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuji dengan teknik regresi linear berganda. Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan moderating. Pengolahan data menggunakan softwer SPSS 21.

Persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$\text{Model 1 } Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

$$\text{Model 2 } Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_1x_5 + b_7x_2x_5 + b_8x_3x_4 + b_9x_4x_5 + e$$

Keterangan :

Y : Kinerja pemerintah daerah kabupaten Kuantan Singingi

a : Kostanta

$b_{1,2,3,4,5}$: Koefisien regresi dari variabel independen dan pemoderasi

x_1 : Akuntabilitas Publik

x_2 : Partisipasi Penyusunan Anggaran

x_3 : kejelasan Sasaran Anggaran

x_4 : Struktur Desentralisasi

x_5 : pengawasan internal

x_1x_5 : interaksi antara akuntabilitas publik dengan pengawasan internal

x_2x_5 : interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran dengan pengawasan internal

x_3x_5 : interaksi kejelasan sasaran anggaran dengan pengawasan internal

x_4x_5 : interaksi struktur desentralisasi dengan pengawasan internal

e : Error

Penelitian ini telah melalui serangkaian uji kualitas data seperti

pengujian validitas, reliabilitas dan normalitas, dapat dikatakan semua instrumen valid, reliable dan normal. Dan asumsi klasik, seperti uji multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Berdasarkan hasil uji tersebut, dapat dinyatakan bahwa setiap variabel telah terdistribusi dengan bebas dari multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang diberikan sebanyak 84 kuesioner dan seluruhnya kembali. Hal ini karena peneliti terjun langsung kelapangan untuk menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian (kinerja aparat pemerintah daerah, akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan pengawasan internal) yang menunjukkan rata-rata standar deviasi.

Tabel 1.

Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah	84	24	44	34,37	5,089
Akuntabilitas Publik	84	24	42	32,88	4,249
Partisipasi Penyusunan Anggaran	84	10	19	15,15	2,103
Kejelasan sasaran Anggaran	84	20	35	26,86	3,341
Struktur Desentralisasi	84	16	29	22,18	3,621

Pengawasan internal	84	10	25	18,18	3,924
Valid N (listwise)	84				

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015

Dari output dapat hasil nilai rata-rata minimum kinerja aparat pemerintah daerah dari 84 responden sebesar 24, maksimum sebesar 44, nilai mean 34,37 dengan standar deviasi 5,089. Sedangkan nilai minimum akuntabilitas publik 24, maksimum 42, nilai mean 32,88 dengan standar deviasi 4,219. Partisipasi penyusunan anggaran nilai minimum 10, maksimum 19, nilai mean 15,15 dengan standar deviasi 2,103. Kejelasan sasaran anggaran nilai minimum 20, maksimum 35, nilai mean 26,86 dengan standar deviasi 3,341. Struktur desentralisasi nilai minimum 16, maksimum 29, nilai mean 22,18 dengan standar deviasi 3,621. Pengawasan internal nilai minimum 10, maksimum 25, nilai mean 18,18 dengan standar deviasi 3,924.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji kualitas data dapat dilakukan melalui uji reliabilitas, validitas dan normalitas. Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Dalam penelitian ini, dari hasil pengujian validitas, reliabilitas dan normalitas, dapat dikatakan semua instrumen valid, reliable dan normal.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Dari hasil pengujian asumsi klasik data menunjukkan bahwa model regresi yang diajukan pada masing-masing variabel bebas dari

gangguan multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Tabel 2.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,979 ^a	,958	,955	1,07391	2,119

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015

Dari table diatas, menunjukkan bahwa nilai D-W pada variabel independen menunjukkan nilai 1,851. Nilai $dl = 1,5472$, $du = 1,7462$, dan $4-du = 2,149$. Maka $du < d < 4-du = 1,7462 < 1,851 < 2,149$, maka tidak ada autokorelasi atau autokorelasi diterima.

Hasil dan Pembahasan Uji Hipotesis

1. Uji koefisien Regresi secara Parsial

Model 1:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + e$$

$$Y = -1,893 + 1,244 (X_1) + 0,383 (X_2) + 0,798 (X_3) + 0,768 (X_4) + e$$

1. Hipotesis Pertama (H_1) Akuntabilitas Publik Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Untuk melihat pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah digunakan uji statistik t. Uji statistik t bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} serta melihat nilai signifikannya. Dimana $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $sig.t < \alpha = 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dan sebaliknya jika

$t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $sig.t > \alpha = 0.05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-3.693 > 1.990$ dan $sig.t (0,000) < 0.05$ dengan demikian H_0 ditolak dan **H_1 diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013), Solina (2014) dan Hidayat (2013) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah, karena dengan adanya pertanggungjawaban publik, masyarakat tidak hanya dapat mengetahui anggaran tersebut tetapi juga dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam melaksanakan seluruh perencanaan yang ada karena akan dinilai dan diawasi oleh masyarakat, dan dilaporkan ke DPRD dalam bentuk laporan kinerja.

2. Hipotesis kedua (H_2) Partisipasi Penyusunan Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.731 > 1.990$ dan $sig.t (0,000) < 0.05$ dengan demikian H_0 ditolak dan **H_2 diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bangun (2009). Tingkat partisipatif para staf dalam penyusunan anggaran akan mendorong moral kerja yang tinggi dan menentukan tentang keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas

3. Hipotesis Ketiga (H_3) Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $10.922 > 1.990$ dan $sig.t (0,000) < 0.05$ dengan demikian H_0 ditolak dan **H_3 diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Annisa (2013), Herry (2014), dan Solina (2014) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menegaskan bahwa dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

4. Hipotesis kedua (H_4) Srtuktur Desentralisasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $10.118 > 1.990$ dan $sig.t (0,000) < 0.05$ dengan demikian H_0 ditolak dan **H_3 diterima**. Dari hasil

pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Annisa (2013), Herry (2014), dan Solina (2014 yang menyatakan bahwa Struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Struktur desentralisasi akan membuat tanggungjawab yang lebih besar kepada SKPD dalam bertindak dan berfikir dalam suatu tim tanpa mengorbankan keputusan dalam suatu organisasi.

Model 2:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4x_4 + b_5x_5 + b_6x_1x_5 + b_7x_2x_5 + b_8x_3x_4 + b_9x_4x_5 + e$$

$$Y = -12.215 + 0.595 (x_1) + -0.757 (x_2) + 0.604 (x_3) + 1.112 (x_4) + 0.411 (x_5) + -0.44 (x_1x_5) + 0.073 (x_2x_5) + 0.007 (x_3x_5) + -0.016 (x_4x_5) + e$$

5. Hipotesis 5 (H₅) : Interaksi Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Internal Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-2.366 > 1.993$ dan $sig.t (0,021) < 0.05$ dengan demikian H₀ ditolak dan **H₅diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal dapat memoderasi pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013). Maka tanggungjawab pemerintah terhadap kinerja akan mendapatkan hasil yang telah diberikan amanah benar-benar dijalankan sesuai dengan ketetapan

anggaran. Jika kurangnya pengawasan maka pelaksanaan APBD tidak terealisasi dengan benar dan pertanggungjawaban bisa dituntut oleh masyarakat. masyarakat dapat berperan dalam pengawasan atas kinerja pemerintah daerah, sehingga jalannya pemerintahan dapat berlangsung dengan baik.

6. Hipotesis keenam (H₆) Interaksi Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Pengawasan Internal Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $-3.157 > 1.993$ dan $sig.t (0,002) < 0.05$ dengan demikian H₀ ditolak dan **H₆diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal dapat memoderasi pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Herry (2014) dari penelitiannya diketahui bahwa pengawasan internal dapat menguatkan atau tidak melemahkan pengaruh hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Karena kurangnya pengawasan terhadap bawahan dalam penyusunan anggaran sehingga tingkat keikutsertaan tidak mencapai kinerja pemerintah yang baik. karena dengan bawahan tidak diikuti serta dalam proses penyusunan anggaran atau berpartisipasi dalam penyusunan anggaran, para bawahan tersebut akan merasa tidak dihargai oleh suatu organisasi, dengan begitu partisipasi anggaran mampu kurang

membentuk sikap, perilaku karyawan dan dapat memunculkan rasa tidak memiliki terhadap organisasi serta menumbuhkan pengaruh negatif terhadap tujuan anggaran.

7. Hipotesis ketujuh (H_7) Interaksi Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengawasan Internal Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0.374 < 1.993$ dan $sig.t (0,710) > 0.05$ dengan demikian H_0 diterima dan **H_7 ditolak**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal tidak dapat memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bangun(2009) dari penelitiannya diketahui bahwa pengawasan internal tidak dapat menguatkan atau melemahkan pengaruh hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan anggaran, maka anggaran yang telah ditujukan tercapai sesuai dengan sasaran dan jelas tujuannya.

8. Hipotesis delapan (H_8) Interaksi Struktur Desentralisasi dan Pengawasan Internal Berpengaruh Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0.671 < 1.993$ dan $sig.t (0,504) > 0.05$ dengan demikian H_0 diterima dan **H_8 ditolak**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal dapat memoderasi pengaruh struktur

desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bangun dari penelitiannya diketahui bahwa pengawasan internal tidak dapat menguatkan atau melemahkan pengaruh hubungan antara struktur desentralisasi dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan terhadap organisasi yang telah mendapatkan tanggungjawab dilakukan dengan penerapan desentralisasi yang baik untuk mencapai kinerja aparat pemerintah daerah.

9. Uji Koefisien Determinasi

Diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.955. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 9,55%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Sedangkan interaksi akuntabilitas publik dan pengawasan internal, interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan pengawasan internal, interaksi kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan internal dan interaksi struktur desentralisasi dan pengawasan internal terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah sebesar 9,64%.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengaruh kinerja SKPD di Kabupaten Kuantan Singingi didalam penelitian ini adalah akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, dan pengawasan

intenal. berdasarkan hasil pengujian statistik dengan menggunakan regresi linier berganda, maka simpulan yang diperoleh adalah :

1. Akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat akuntabilitas publik atau pertanggungjawaban maka akan semakin baik kinerja aparat pemerintah daerah.
2. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penyusunan anggaran (SKPD diikutsertakan dalam penyusunan anggaran) maka akan semakin baik kualitas dari kinerja aparat pemerintah daerah.
3. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jelas sasaran anggaran yang ingin di capai maka akan semakin baik kualitas dari kinerja aparat pemerintah daerah.
4. Struktur desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik struktur desentralisasi maka akan semakin baik kualitas dari kinerja aparat pemerintah daerah.
5. Interaksi akuntabilitas publik dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal

memperkuat hubungan antara akuntabilitas publik dengan kinerja aparat pemerintah daerah.

6. Interaksi partisipasi penyusunan anggaran dan pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal mempekuat hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.
7. Interaksi kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal memperlemah hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah.
8. Interaksi struktur desentralisasi dan pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan internal memperlemah hubungan antara struktur desentralisasi dengan kinerja aparat pemerintah daerah.

Saran

1. Penelitian selanjutnya mungkin dapat mempertimbangkan untuk menggunakan objek penelitian yang lebih luas dengan ruang lingkup Provinsi (tingkat I), mempertimbangkan beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah untuk dapat

meningkatkan praktek di lapangan dan sebaiknya lebih luas cakupan satuan kerjanya karena satuan kerja yang lebih luas diharapkan dapat memungkinkan klasifikasi yang berbeda.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa penerapan akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan pengawasan internal SKPD Kabupaten Kuantan Singingi telah baik dilakukan, tapi masih ada beberapa hal yang belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna sebaiknya SKPD Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pengkajian ulang agar kinerja aparat pemerintah daerah SKPD dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, A. (2009). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan dalam Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating*. Medan.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Efendi, Alfhan. 2013. *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi terhadap kinerja manajerial*. Jurnal akuntansi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Herry, Gede, dkk. 2014. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan dalam Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Moderating*. Jurnal Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha. Bandung.
- Imam, Ghozali. 2009. *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Keempat. Andi, Yogyakarta.
- Meria, Solina. 2014. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial pada SKPD Kota Tanjungpinang*. Jurnal Akuntansi.

- Universitas Maritim
Raja Ali Haji.
Tanjungpinang.
- Pratiwy, A. (2013). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi. Padang.
- Putra, D. (2013). *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Padang*. Jurnal Akuntansi. Padang.
- Septiyani, Anna. 2010. *Pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel pemoderasi*. Jurnal akuntansi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Syafrial. (2009). *Pengaruh Ketepatan Skedul Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Manajerial SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun*.
- Wahyuni, Riska. 2014. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi, dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial pada Pemerintah Kota Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Riau, Riau.